

GOVERNMENT-PRIVATE SECTOR COLLABORATION STRATEGIES IN IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES

Muhammad Rizki¹.

¹Program Ilmu Administrasi Publik.

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia

e-mail: *¹ [*muhammadrizki26377@gmail.com](mailto:muhammadrizki26377@gmail.com)

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Accepted: 15 Nov 2025

Revised: 18 Nov 2025

Published: 25 December
2025

Keywords:

Collaboration, Government,
Private Sector, Public
Private Partnership (PPP),
Public Services.

Public services are one of the main indicators of successful governance. However, in practice, the government still faces various challenges such as budget constraints, low human resource capacity, and the complexity of community needs. Therefore, collaboration between the government and the private sector through Public Private Partnership (PPP) schemes is an important strategy for improving the quality of public services. This study aims to analyze the concept, benefits, challenges, and strategies for optimizing collaboration between the government and the private sector in improving the quality of public services. The method used is a qualitative approach with analytical-interpretative library research, with data sources in the form of scientific journals, academic books, and relevant policy documents. Data analysis was conducted using content analysis techniques. The results of the study show that collaboration between the government and the private sector provides significant benefits in improving service efficiency, accelerating infrastructure development, reducing the financial burden on the state, and creating jobs. However, this collaboration also faces challenges in the form of conflicts of interest, weak supervision, risk imbalances, and regulatory complexity.

I. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pemerintah yang secara langsung menentukan kualitas hidup masyarakatnya. Pemerintah dituntut untuk mampu menyediakan pelayanan yang cepat, responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan warga negara. Hal tersebut juga sesuai dengan isi undang undang No. 25 Tahun 2009 yaitu tentang pelayanan publik, yang secara jelas menuntut terselenggaranya layanan yang prima, transparan, akuntabel, dan selalu mementingkan kepentingan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai macam tantangan di lapangan. Permasalahan yang sering kali muncul seperti inefisiensi birokrasi, terfragmentasinya layanan, rendahnya responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam, serta masih banyak ditemukannya praktik penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi ini yang sering kali menjadi hambatan untuk masyarakat mendapatkan hak hak dasar mereka. Tantangan ini semakin kompleks mengingat karakteristik geografis Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki keragaman sosial, budaya, serta tingkat pembangunan infrastruktur yang berbeda beda di setiap daerahnya (Suwandi et al., 2025).

Dalam menghadapi berbagai macam tantangan pada pelayanan publik modern, terjadi perubahan mendasar dalam paradigma pemerintahan. Pendekatan *Old Public Administration* yang bersifat hierarkis dan komando telah bergeser menuju *New Public Management* yang lebih menitikberatkan pada efisiensi serta mekanisme pasar. Perkembangan selanjutnya membawa pada munculnya konsep *New Public Governance*, yang menegaskan bahwa penyelesaian persoalan publik secara efektif tidak lagi menjadi kewenangan tunggal dari pemerintah. Sebaliknya, hal tersebut memerlukan partisipasi aktif serta kerja sama dari berbagai sektor, termasuk sektor swasta (Suwandi et al.,

2025). Dalam kondisi ini kemudian memunculkan kebutuhan akan suatu model tata kelola baru yang lebih responsif, kreatif, dan berbasis kolaborasi salah satunya melalui kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta semakin dipandang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang dihadapi pemerintah, baik dalam aspek anggaran, sumber daya manusia, maupun kemampuan teknis, sehingga birokrasi tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan publik secara optimal. Dari berbagai penelitian mengenai model kolaborasi dan kemitraan menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mampu memperkuat kapasitas pelayanan, mempercepat penyediaan layanan, serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pelayanan publik (Sukma & Furqon, 2025).

Salah satu bentuk kolaborasi yang paling sering terlihat ialah *Public Private Partnership* (PPP). Skema PPP ini memberikan peluang bagi sektor swasta untuk terlibat dalam pembiayaan, pembangunan, serta pengelolaan aset maupun layanan publik. Penelitian klasik mengenai PPP di Kota Makassar mengungkapkan bahwa pengelolaan ruang publik Lapangan Karebosi melalui kemitraan pemerintah dan swasta mampu mengurangi beban fiskal pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas publik yang dimanfaatkan masyarakat (Mahsyar, 2015). Temuan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa PPP tidak hanya berperan sebagai alternatif sumber pendanaan, tetapi juga sebagai instrumen inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan layanan publik dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Dalam dua puluh tahun terakhir, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta atau *Public Private Partnership* (PPP) telah menjadi salah satu strategi yang banyak diterapkan dalam penyediaan layanan publik.

Konsep ini berkembang seiring dengan perubahan paradigma administrasi publik yang menekankan efisiensi, inovasi, serta sinergi antaraktor. PPP tidak hanya dipahami sebagai perjanjian kerja sama, tetapi juga sebagai suatu mekanisme tata kelola kolaboratif yang memadukan sumber daya, pengetahuan, dan peran strategis masing-masing pihak untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam kerangka PPP, pemerintah berperan dalam menetapkan arah kebijakan, memberikan legitimasi, serta mengatur regulasi, sementara sektor swasta berkontribusi melalui kompetensi manajerial, teknologi, efisiensi operasional, dan investasi modal yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh anggaran pemerintah.

Kolaborasi semacam ini telah menjadi praktik yang lazim di berbagai negara, khususnya pada sektor kesehatan, transportasi, penyediaan air bersih, perumahan, layanan digital, dan pembangunan infrastruktur dasar. Kerja sama antara sektor publik dan swasta mampu meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan akses, mempercepat proses pembangunan, serta mendorong inovasi teknologi (Qaedi Aqsa & Nugroho, 2023). Kondisi tersebut dimungkinkan karena sektor swasta memiliki motivasi kuat untuk memaksimalkan efisiensi dan mutu layanan sebagai bagian dari orientasi bisnisnya. Ketika digabungkan dengan fungsi regulatif pemerintah, bentuk kolaborasi ini dapat menghasilkan nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

Pada praktiknya kolaborasi antara sektor publik dan swasta juga terbukti efektif dalam sektor-sektor dasar, seperti layanan energi dan pelayanan bagi komunitas nelayan. Sebagai ilustrasi, penelitian mengenai pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa PPP mampu memperluas akses masyarakat terhadap energi secara lebih cepat dan efisien, meskipun masih terdapat tantangan terkait kondisi fasilitas serta keterjangkauan Lokasi (Muchtar Luthfi Malik Al Azhar, Imam

Hardjanto, 2024). Temuan tersebut menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor dapat diterapkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur berskala besar, tetapi juga pada layanan publik di tingkat lokal.

Selain itu, kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya berbentuk PPP, tetapi juga *collaborative governance*, yaitu model tata kelola yang melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Penelitian mengenai pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa kolaborasi antarpihak dapat berlangsung secara efektif apabila terdapat desain kelembagaan yang tegas, koordinasi yang kuat antarinstansi, serta kepemimpinan yang mendukung (Assyfa et al., 2024). Studi tersebut memperlihatkan bahwa kolaborasi mampu memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan, termasuk kemudahan akses, penyederhanaan prosedur, dan kepastian waktu layanan.

Di sisi lain, keberhasilan kolaborasi tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan kerangka hukum atau kemampuan teknis masing-masing aktor. Unsur tata kelola, seperti transparansi, akuntabilitas, koordinasi, serta kepercayaan antaraktor, memainkan peran yang sangat penting. Penerapan prinsip *good governance* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak berjalan dengan baik, kolaborasi berpotensi gagal atau bahkan menimbulkan dampak negatif, seperti ketimpangan akses, konflik kepentingan, maupun inefisiensi biaya.

Selain aspek tata kelola, perbedaan orientasi antara pemerintah dan pihak swasta juga menjadi sumber tantangan. Pemerintah berfokus pada kepentingan publik, sedangkan sektor swasta cenderung berorientasi pada keuntungan. Apabila kolaborasi tidak dirancang dengan pembagian peran dan risiko yang jelas, ketidakseimbangan

kekuatan dapat muncul sehingga merugikan kepentingan publik. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme regulasi, kontrak, dan pengawasan disusun secara matang agar orientasi bisnis swasta tetap berada dalam koridor tujuan pelayanan publik.

Secara teoritis, kajian mengenai kolaborasi lintas sektor semakin penting dalam konteks paradigma *governance* yang menekankan interaksi antar aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemitraan pemerintah dan swasta merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Penelitian (Qaedi Aqsa & Nugroho, 2023) turut menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan nilai publik yang lebih besar dibandingkan apabila masing-masing aktor bekerja secara terpisah.

Dari sudut pandang administratif, kolaborasi juga menjadi respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks. Masyarakat masa kini menghendaki layanan yang cepat, mudah, serta terintegrasi. Pemerintah, sebagai institusi yang cenderung hierarkis, sering kali mengalami keterlambatan dalam menyesuaikan diri. Melalui kemitraan dengan pihak swasta, khususnya perusahaan teknologi, inovasi dapat dihadirkan ke dalam birokrasi sehingga pelayanan menjadi lebih modern dan responsif.

Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Tantangan seperti proses birokratis yang rumit, lemahnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan, serta resistensi internal sering kali mengurangi efektivitas kolaborasi. Selain itu, sebagian daerah masih memiliki kapasitas yang rendah dalam mengelola kebijakan kerja sama, baik pada tahap perencanaan, pengelolaan kontrak, maupun evaluasi. Jika tidak ditangani, hambatan tersebut dapat menurunkan kualitas kerja sama atau bahkan menimbulkan kerugian bagi pemerintah.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, penelitian mengenai strategi kolaborasi pemerintah dan swasta menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam membantu pemerintah merumuskan kebijakan kolaboratif yang efektif. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep konsep, manfaat, tantangan, serta strategi yang dapat ditempuh pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka (library research) yang bersifat analitis-interpretatif. Fokus utama pada penelitian ini adalah menganalisis strategi kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam peningkatan pelayanan publik. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menelaah secara mendalam mengenai konsep, manfaat, tantangan, serta strategi pemerintah dan sektor swasta yang menjadi landasan dasar dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang bertujuan mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang startegi pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan pelayanan publik. Kajian dilakukan melalui pendekatan interpretatif, yaitu menafsirkan kebijakan publik, hasil penelitian terdahulu, serta hasil praktik kemitraan yang telah dijalankan dalam berbagai sektor pelayanan. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti buku akademis, jurnal terakreditasi dan artikel ilmiah yang membahas pelayanan

publik, kolaborasi pemerintah dan swasta, serta studi studi terdahulu yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen cetak maupun digital seperti buku akademis, jurnal, ataupun artikel ilmiah yang membahas tentang strategi kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis dengan cara mencatat dan memberi kode terhadap tema-tema penting seperti pelayanan publik, kolaborasi pemerintah dan swasta, dan strategi mengoptimalkan kolaborasi.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang dikembangkan oleh (Miles, M.B., & Huberman, 1994) yang berfokus pada makna filosofis dan ideologis dari teks yang dikaji. Proses analisis melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu proses penyaringan dan pemilihan data yang sesuai dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data, yaitu pengorganisasian data ke dalam kerangka tematik yang meliputi konsep kolaborasi pemerintah dan swasta, manfaat kolaborasi pemerintah dan swasta, tantangan kolaborasi pemerintah dan swasta, serta strategi pengoptimalan kolaborasi pemerintah dan swasta dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Penarikan kesimpulan, yakni perumusan temuan inti yang menggambarkan efektivitas serta kontribusi kolaborasi pemerintah dan swasta dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik.

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Konsep Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta

Kolaborasi antara pemerintah dan swasta yang biasa dikenal dengan *Public Private Partnership* (PPP), adalah suatu strategi kerja sama yang dibuat untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam skema ini, pemerintah dan sektor swasta menjalin kemitraan untuk mewujudkan kepentingan bersama dengan mengoptimalkan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing masing pihak. PPP disini hadir dengan berbagai model, bergantung pada pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta (Faisal Amur Said Hamed Al Habsi, 2022). Adapun beberapa model yang umum digunakan dalam kolaborasi ini menurut (Sukma & Furqon, 2025):

- a. Model Build-Operate-Transfer (BOT) merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang dimana pihak swasta bertanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan proyek infrastruktur seperti jalan tol atau pembangkit listrik dalam jangka waktu tertentu. Setelah masa kontrak berakhir, pengelolaan serta kepemilikan proyek tersebut kembali diserahkan ke pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah mendapatkan manfaat dari dukungan teknis dan pendanaan dari sektor swasta, sedangkan pihak swasta mendapatkan keuntungan dari investasi yang diperoleh selama periode operasional.
- b. Concession Agreement atau perjanjian konsesi merupakan bentuk kolaborasi yang dimana pemerintah memberikan kewenangan untuk mengelola dan mengoperasikan layanan publik kepada pihak swasta, seperti air bersih maupun transportasi dalam jangka waktu tertentu. Dalam model ini, pihak swasta memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan

- layanan tersebut sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, sementara itu kepemilikan aset tetap dipegang oleh pemerintah. Dari hal tersebut membuat pemerintah dapat mengalihkan sebagian risiko operasionalnya ke pihak swasta sekaligus juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Joint Ventures atau usaha patungan merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta yang dimana keduanya saling berbagi kepemilikan sekaligus tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu proyek. Dalam skema ini, kedua belah pihak saling memberikan kontribusinya dalam hal modal, sumber daya, ataupun keahlian sehingga terciptannya kerja sama yang saling menguntungkan. Melalui kolaborasi ini, proyek berskala besar yang membutuhkan investasi besar dan memiliki risiko tinggi dapat terlaksana dengan baik.
 - d. Outsourcing Services atau alih daya layanan yaitu praktik kerja sama yang dimana pemerintah memberikan tanggung jawabnya kepada pihak swasta untuk mengelola layanan tertentu, seperti pengelolaan limbah ataupun pemeliharaan jalan. Melalui pengalihan tanggung jawab tersebut pemerintah jadi bisa lebih fokus pada tugas dan fungsi utamanya. Penerapan alih daya ini juga berpotensi terjadinya inovasi baru dan meningkatkan mutu pelayanan melalui mekanisme persaingan dilingkungan pasar.

B. Manfaat Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta

Kerja sama antara pemerintah dan swasta, atau *public private partnership* (PPP) memberikan manfaat strategis bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah penjelasan dari manfaat tersebut:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik
 - Kerja sama kontrak antara pemerintah dan pihak swasta

dalam sektor administrasi publik merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik. Melalui pengelolaan oleh sektor swasta, proses pelayanan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pengelolaan yang sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah (Wang et al., 2018).

b. Mengurangi beban keuangan pemerintah

Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam skema *public private partnership* (PPP) berperan dalam mengurangi beban anggaran negara melalui mekanisme pembagian biaya proyek. Dalam implementasinya, sektor swasta umumnya menanggung bagian terbesar dari pembiayaan awal proyek, sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mengalokasikan anggaran pada sektor prioritas lainnya (Akomea-frimpong et al., 2021).

c. Menciptakan lapangan kerja baru

Proyek-proyek yang dihasilkan melalui kolaborasi ini berkontribusi dalam membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur berskala besar memerlukan tenaga kerja dalam jumlah signifikan, baik pada tahap konstruksi maupun operasional, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja secara langsung, sekaligus meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal melalui proses pelatihan. Selain itu, tersedianya infrastruktur yang lebih baik turut mendorong tumbuhnya peluang ekonomi baru, terutama melalui berkembangnya berbagai usaha yang memanfaatkan kemudahan akses terhadap pasar dan layanan (Sukandi, 2024).

d. Mempercepat pembangunan infrastruktur

Melalui kerja sama ini membuat pembangunan infrastruktur menjadi lebih cepat dan efisien. Sektor swasta dalam hal ini

memiliki keahlian dan manajemen proyek yang baik untuk dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur tanpa mengabaikan kualitasnya. Selain itu, sektor swasta juga memiliki pengalaman dalam menyelesaikan suatu proyek dengan tepat waktu. Dengan dana yang bersumber dari sektor swasta membuat pembangunan proyek dapat dilakukan lebih awal tanpa harus menunggu anggaran dari pemerintah. Hal ini sangat penting untuk pembangunan yang bersifat darurat (Akomea-frimpong et al., 2021).

C. Tantangan Dalam Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta

Walaupun dalam kolaborasi ini terdapat banyak manfaat. Namun, dalam implementasinya dihadapkan juga dengan berbagai macam tantangan yang menghambat efektivitas dan keberlanjutan kemitraan ini. Menurut (Berman et al., 2021) tantangan dalam kolaborasi pemerintah dan sektor swasta sebagai berikut:

- a. Konflik kepentingan dapat muncul akibat perbedaan orientasi tujuan antara sektor publik yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta yang menekankan pada pencapaian keuntungan finansial.
- b. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas masih sering ditemukan dalam kolaborasi ini, seperti dalam pelaksanaan proses tender maupun penyusunan kontrak kerja sama, di mana prosedur yang tidak terbuka tersebut berpotensi menimbulkan praktik korupsi, kolusi, serta penyalahgunaan kewenangan. Hal tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek kerja sama.
- c. Ketidakseimbangan risiko, pembagian risiko dalam proyek kerja sama sering kali tidak dilakukan secara adil, sehingga pemerintah

menanggung risiko yang lebih besar, seperti risiko kegagalan proyek, pembengkakan biaya, maupun perubahan kebijakan. Sementara itu, pihak swasta cenderung memperoleh perlindungan yang lebih besar, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan kerja sama.

- d. Pengawasan yang lemah, kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kerja sama dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas layanan, penyimpangan dari ketentuan kontrak, hingga pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swasta. Lemahnya pengawasan juga menghambat upaya penegakan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek.
- e. Kompleksitas regulasi, proses birokrasi yang rumit dan lambat selalu menjadi penghambat dalam proses mendapatkan izin dan menjalankan proyek, sehingga terjadinya penundaan pelaksanaan dan peningkatan biaya yang tidak seharusnya. Ketidakpastian tersebut membuat investor swasta ragu untuk ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek kolaborasi dengan pemerintah.

D. Strategi Untuk Mengoptimalkan Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta

Beragam strategi telah dibuat untuk mengoptimalkan peran pemerintah dan sektor swasta, yang disusun berdasarkan kajian terhadap praktik serta pembelajaran dari berbagai studi kasus. Setiap strategi memiliki fokus dan sasaran yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam peningkatan kualitas layanan publik.

- a. Memperkuat kerangka regulasi

Penguatan kerangka regulasi merupakan langkah awal yang

untuk menentukan keberhasilan kemitraan pemerintah dan sektor swasta. (Ardiyanto, A., & Wahyuni, 2020) menegaskan bahwa harmonisasi regulasi di berbagai tingkatan pemerintahan menjadi prasyarat penting untuk membentuk iklim investasi yang kondusif bagi keterlibatan sektor swasta. Ketidaksinkronan kebijakan berpotensi menimbulkan hambatan administratif serta ketidakpastian hukum yang dapat mengurangi minat investor. Oleh karena itu, pembentukan lembaga khusus seperti Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dinilai efektif dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Lembaga ini berfungsi sebagai penghubung strategis antara pemerintah dan pihak swasta, sekaligus memastikan bahwa seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan proyek berjalan secara transparan, terintegrasi, dan selaras dengan kepentingan nasional. Dengan adanya kelembagaan yang kuat, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terarah, akuntabel, dan mampu mempercepat realisasi proyek-proyek strategis.

b. Meningkatkan kompetensi aparatur negara

Peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan menjadi aspek penting dalam kemitraan ini. (Hermawan, A., & Junaedi, 2019) menegaskan bahwa penguasaan kompetensi tersebut perlu terus ditingkatkan melalui program pelatihan khusus dan sertifikasi profesional. Upaya ini mampu memperbaiki kualitas interaksi antara pemerintah dan sektor swasta, mengurangi potensi terjadinya konflik, serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Dengan meningkatnya keterampilan aparatur, pengelolaan hubungan kemitraan dapat dilakukan secara lebih profesional dan efektif, sehingga peningkatan kapasitas aparatur pemerintah menjadi aspek yang sangat

penting dalam kemitraan ini.

c. Memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan dalam setiap pelaksanaan tahapan proyek kemitraan ini serta perlu dilakukan pengawasan juga. (Suhendra, 2017) menjelaskan bahwa penyebaran informasi proyek harus dilakukan secara terbuka, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, serta melakukan evaluasi kinerja oleh pihak independen untuk memperkuat kepercayaan publik. Melalui transparansi tersebut, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk berperan aktif dalam proses pembangunan.

d. Membangun budaya kolaborasi

Penguatan budaya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat dilakukan melalui komunikasi yang intensif, pembangunan kepercayaan, serta kepemimpinan publik yang berorientasi pada akuntabilitas. Upaya ini dapat diwujudkan dengan melakukan dialog rutin antar pihak, pelaksanaan kegiatan bersama seperti lokakarya dan pembentukan tim kerja gabungan, serta peran aktif pimpinan publik dalam menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan dan tanggung jawab. Terbangunnya kepercayaan akan mampu mengurangi hambatan dalam pertukaran informasi serta meminimalkan potensi konflik. Dari studi kasus yang dilakukan oleh (Reig & Gasco-hernandez, 2021) juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan antar pihak dapat menghambat transparansi dan koordinasi, sementara komunikasi yang efektif berperan penting dalam menyelaraskan tujuan kolaborasi.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) merupakan strategi yang relevan dan penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di

Indonesia. Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan dari *Old Public Administration* menuju *New Public Governance* menuntut keterlibatan berbagai aktor di luar pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kolaborasi ini tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi, serta keberlanjutan pelayanan publik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dan sektor swasta memberikan berbagai manfaat strategis, antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi beban keuangan negara, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sektor swasta memiliki keunggulan dalam hal manajemen, teknologi, dan efisiensi operasional yang dapat melengkapi keterbatasan pemerintah. Sementara itu, pemerintah berperan dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan kolaborasi tetap berada dalam koridor kepentingan publik melalui fungsi regulasi dan pengawasan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Akomea-frimpong, I., Jin, X., & Osei-kyei, R. (2021). Public – private partnerships for sustainable infrastructure development in Ghana : a systematic review and recommendations. *Public Management Review*.

Ardiyanto, A., & Wahyuni, S. (2020). Penguatan Kerangka Regulasi dalam Kolaborasi Publik- Swasta. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 123–135.

Assyfa, A. N., Rahmadanita, A., & Tumija, T. (2024). Collaborative

Governance Pada Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. *Jurnal Media Birokrasi*, 6(2), 123–139.

Berman, E. M., Bowman, J. S., & Jonathan P. West, M. R. V. W. (2021). *Human Resource Management in Public Service: Paradoxes, Processes, and Problems*. Cq Press.

Faisal Amur Said Hamed Al Habsi, A. U. (2022). The Role of the Public-Private Partnership (PPP) in Achieving the Optimal Economic and Social Benefits Through the Port Sector. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 8(5), 57–65.

Hermawan, A., & Junaedi, I. (2019). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah dalam Kolaborasi Publik-Swasta. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 45–58.

Mahsyar, A. (2015). Public Private Partnership: Kolaborasi Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Asset Publik Di Kota Makassar 1. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 71–80.

Miles, M.B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage.

Muchtar Luthfi Malik Al Azhar, Imam Hardjanto, M. H. (2024). KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara) Muchtar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 1048–1057.

Qaedi Aqsa, & Nugroho, B. Y. (2023). A Literature Review: Cross-Sector Collaboration Arrangements to Deliver Public Services and Goods. *Technium Social Sciences Journal*, 40, 1–10.

Reig, M., & Gasco-hernandez, M. (2021). *Internal and External Transparency in Public-Private Partnerships — The Case of Barcelona 's Water Provision*.

Suhendra, R. (2017). Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proyek Kolaborasi. *Jurnal Manajemen Proyek*, 4(2), 89–102.

Sukandi, A. (2024). Analysis of Opportunities and Challenges for Subang City within the Framework Rebana Triangle Economic Region. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 2(1), 68–83.

Sukma, C. A., & Furqon, I. K. (2025). Kolaborasi Strategis: Peran Publik Dan Swasta Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 5(1), 1–13.

Suwandi, S., Kurniasari, A. P., Alfiany, A. N., Kamalludin, N. S., & Maemunnah, A. (2025). Kolaborasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(3), 231–240.

Wang, H., Xiong, W., Wu, G., & Zhu, D. (2018). Public – private partnership in Public Administration discipline : a literature review Public – private partnership in Public Administration. *Public Management Review*, 20(2), 293–316.